

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (4 ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Akbar, M. (2014). Budaya Merokok Sulit, Ini Dia Penyebabnya. Diambil 25 Februari 2021, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/n5vllj/antara>
- Annisah, Gunawan, I. K., & Budiman. (2018). Studi Tentang Penetapan dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda, *6*(2), 657–668.
- Antara. (2020). Nafsiah Mboi malu Indonesia tidak tanda tangani FCTC. Diambil 27 Januari 2021, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1787225/nafsiah-mboi-malu-indonesia-tidak-tanda-tangani-fect>
- Aricahyono, S. (2016). *Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta.
- Asmawi. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Journal Cita Hukum*, *II*(1), 1–18.
- Babbie, E. (2012). *The Basics of Social Research*. Canada: Wadsworth CENGAGE Learning.
- Batubara, M. M. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (1 ed.). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (1 ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (2 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2 ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, H. (2017). PERDA KTR Padang : P3I Sumbar Minta Larangan Iklan Rokok Ditinjau Kembali. Diambil 5 Mei 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170816/12/681439/perda-ktr-padang-p3i-sumbar-minta-larangan-iklan-rokok-ditinjau-ulang>
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif -Teori & Praktik* (1 ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Haluan. (2017). Tahun Depan Iklan Rokok Dilarang Di Kota Padang. Diambil dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/65225/tahun-depan-iklan-rokok-dilarang-di-kota-padang>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (1 ed.). Semarang: Widya Karya Semarang.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Ihsanudin. (2016). Soal Ratifikasi FCTC, Jokowi Tak Mau Indonesia Asal Ikut Tren. Diambil 27 Januari 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/14225981/soal.ratifikasi.fctc.jokowi.tak.mau.indonesia.asal.ikut.tren>.
- ikhwan wahyudi. (2019). walikota padang heran perda ktr tak kunjung disahkan dprd. Diambil 20 Oktober 2019, dari <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/256477/wali-kota-padang-heran-perda-ktr-tak-kunjung-disahkan-dprd>
- Ikhwan Wahyudi. (2019). penelitian perokok disumbar didominasi usia pelajar. Diambil dari <https://www.antarane.ws.com/berita/789367/penelitian-perokok-di-sumbar-didominasi-usia-pelajar>
- Infonusantara. (2017). Sudah Tiga Kali Paripurna, Pengesahan Revisi Perda KTR Padang Masih Buntu. Diambil 6 Oktober 2020, dari <http://www.infonusantara.net/2017/12/sudah-tiga-kali-paripurna-pengesahan.html>
- Islamy, M. I. (2011). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (2 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismariani, Indra Fajarwati, S. (2015). Perilaku Merokok Pegawai Pasca Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Makassar, 69–75.
- Jauziyah, I. Q. Al. (2014). *Buku Pintar Memutuskan Perkara dari Rumah Tangga, Peradilan sampai Neraka* (1 ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Juanita. (2012). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Peluang Dan Hambatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 01(02), 112–119.
- Kesehatan, U. N. 36 tahun 2009 T. Presiden Republik Indonesia, Pub. L. No. 36 (2009). Indonesia.
- Khan, A. R. (2016). Policy Implementation : Some Aspects And Issue. *Journal of Community Positive Practices (JCPP)*, XVI(1582–8344), 3–12.

- Knoepfel, P., Larrue, C., & Hill, M. (2007). *Public Policy Analysis* (1 ed.). Bristol: Policy Press.
- May, P. J. (2014). Implementation failures revisited : Policy regime perspectives. <https://doi.org/10.1177/0952076714561505>
- Mcconnell, A. (2014). *why Do Policies Fail? A Starting Point for Exploration*.
- Nasution, M. S. (2019, April 5). Pemkot Padang dinilai tidak siap, DPRD tolak usulkan revisi perda KTR. Diambil 26 Januari 2021, dari <https://sumbar.antaraneews.com/berita/257673/pemkot-padang-dinilai-tak-siap-dprd-tolak-usulkan-revisi-perda-ktr>
- Nugroho, P. S., Kusumawati, Y., & Wijayanti, A. C. (2015). Evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok (ktr) fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah surakarta naskah publikasi. *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Parsons, W. (2017). *Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan* (7 ed.). Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah No 24. Kawasan Tanpa Rokok, Pub. L. No. No 24 (2012). Indonesia.
- Pewara, A. N. (2009). Efektivitas kebijakan kawasan bebas asap rokok di disa bone-bone kecamatan baraka kabupaten enrekang, 1–15.
- Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1. Diambil dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf>
- Radian Ilmaskal, Yaiy Suryo Prabandari, T. A. W. (2017). Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di kota Padang Panjang. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(5), 257–262.
- Riant Nugroho. (2014). *Kebijakann Publik di negara-negara berkembang* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. (2017). *Public Policy* (6 ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rudi, A. (2016). Kisah Batalnya Indonesia Meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau Jelang Pemilu 2004.
- Solahuddin Kusumanegara. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*

- (1 ed.). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sopiah, E. M. S. &. (2010). *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (1 ed.). Yogyakarta: CV Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi* (22 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- sumbarfokus. (2019). dprd padang klaim perda ktr belum disahkan karena walikota enggan. Diambil dari <https://www.sumbarfokus.com/berita-dprd-padang-klaim-perda-ktr-belum-disahkan-karena-walikota-enggan.html>
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, F. M. (2019). *Etika Politik* (1 ed.). Jakarta: PT Gramedia.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik* (1 ed.). Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tempo.co. (2017). Walikota Padang Tolak Iklan Rokok, Siap Kehilangan PAD Rp 4 Miliar.
- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(April), 1–11.
- Trisnowati, H., & Sunarti, S. (2016). Peran Mahasiswa dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. *Medika Respati*, 11(January 2016).
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XIV(1), 1–16.
- Zismeda Taruna. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, V, 567–577.
- <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/05/27/59342/sumbar-peringkat-ke-6-perokok-terbesar.html> diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 18.00 WIB
- <http://poskotanews.com/2014/05/21/adat-salah-satu-kendala-terapkan-larangan-merokok/> diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 18.55 WIB
- <http://prokabar.com/perokok-di-sumbar-didominasi-usia-remaja/> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019 jam 17.58 WIB
- <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/256477/wali-Kota-Padang-heran-perda-KTR->

tak-kunjung-disahkan-dprd diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 jam 21.20 WIB

<https://www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFpemko-Padang-harus-hati-hati-tetapkan-KTR/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 jam 22.16 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah> diakses pada tanggal 30 September 2019 jam 18.15 wib

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 jam 22.25 WIB

<https://prokabar.com/perda-KTR-belum-juga-disahkan-dprd-Padang/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 jam 22.20 WIB

<https://www.bentengsumbar.com/2017/12/revisi-perda-KTR-muhidi-tak-ada-alasan.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2019 jam 22.49 WIB

[https://www.batamnews.co.id/berita-25437-pemko-Padang-larang-spg-cantik-ju ' rokok-apa-alasannya.html](https://www.batamnews.co.id/berita-25437-pemko-Padang-larang-spg-cantik-ju- ' rokok-apa-alasannya.html) diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 jam WIB

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/03/100100626/cukai-rokok-sumbang-rp-153-triliun-ke-kas-negara-pada-2018> diakses pada tanggal 4 November 2019 jam 15.00 WIB

https://www.kompasiana.com/shofiah_almunawwaroh/552c1beb6ea834cc5c8b4571/pbnu-fatwa-haram-mui-soal-rokok-tendensius diakses pada tanggal 4 November 2019 pada jam 15.03 WIB

<https://sumbar.antaranews.com/berita/256477/wali-kota-padang-heran-perda-KTR-tak-kunjung-disahkan-dprd> diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 13.48 WIB

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/68138/7-fraksi-tolak-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-padang> diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 14.12 WIB